



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 21 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



Dari 1.400 Usulan Program, Hanya 19 yang Sesuai Ketentuan

Masalah Administrasi hingga
Tak Selaras Rencana Pembangunan

SIDOARJO – Ribuan aspirasi masyarakat yang di-himpun anggota DPRD Sidoarjo melalui kegiatan reses menghadapi kendala untuk masuk dalam perencanaan pembangunan 2027. Dari sekitar 1.400 usulan program di pokok pikiran (pokir), hanya 19 yang dinilai sesuai dengan kaidah pengajuan. Tidak hanya masalah administrasi hingga pengisian data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ada banyak usulan yang tak selaras program pembangunan daerah. Sehingga usulan tidak bisa diakomodasi pemerintah. Pelaksana Harian (Ph) Sekda

Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, banyaknya usulan yang belum sesuai ketentuan bukan berarti aspirasi masyarakat tidak dibutuhkan. Namun, setiap usulan harus memenuhi mekanisme dan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. "Kesalahan pengisian data dan ketidaklengkapan dokumen dapat membuat aspirasi yang disampaikan tidak terakomodasi dalam perencanaan," kata Ainur di sela-sela acara pembekalan pokir, Senin (19/10). Ainur menjelaskan, usulan pokir tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam program pembangunan tanpa melalui

proses penyesuaian. Setiap usulan harus selaras dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah, termasuk program prioritas bupati dan wakil bupati. Menurut Ainur, tidak ada jatah anggaran pokir dengan nominal tertentu bagi setiap anggota DPRD. Besaran anggaran yang dapat dialokasikan bergantung pada prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dewan
Diminta Evaluasi
Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih meminta se-

tiap usulan benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. "Saya minta agar usulan juga mempertimbangkan program pembangunan pemerintah daerah," kata Nasih. Dia juga meminta anggota DPRD mengecek kembali usulan yang telah diajukan. Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada daftar permintaan, tetapi memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam mendukung pembangunan daerah. (ful/hen)



Sumber: Ph Sekda Sidoarjo

Bupati Subandi Pastikan Rumah Nyaris Roboh Segera Diperbaiki

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Senin (19/10/2026). Dalam kunjungan itu, Subandi memastikan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga segera dilakukan. Dia juga menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga penyandang disabilitas dan penderita stroke.

Sidak tersebut dilakukan bersama Dinas Sosial Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, perangkat desa, serta RT/RW setempat. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah Sukarsih (66), warga RT 02 RW 05 Desa Watutulis, yang kondisinya memprihatinkan dan nyaris roboh.

Melihat kondisi rumah tersebut, Subandi memastikan perbaikan akan dimulai dalam waktu dekat. Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 juta untuk mendukung perbaikan rumah tersebut. "Insyaallah minggu depan sudah mulai ada perbaikan. Sebelum ada perbaikan, saya minta Pak Kades mengajak warga untuk swadaya, kerja bakti bersama-sama membersihkan dan menyiapkan lingkungan sekitar," kata Subandi, Selasa, (20/10/2026).

Menurut Subandi, anggaran perbaikan perlu didukung dengan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong. Dengan begitu, proses pembangunan rumah dapat berjalan lebih optimal dan hasilnya bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. "Kalau hanya mengandalkan anggaran Rp 25 juta tanpa swadaya masyarakat, tentu tidak cukup. Karena itu lingkungan sekitar kami harapkan ikut membantu," ujarnya. (md/rus)



Bupati Subandi memberikan bantuan ke warga Prambon Sidoarjo.

KILAS DEWAN

Sosialisasi Tata Kelola Pokir DPRD Harus Ada Manfaat Bagi Warga Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Pokir-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin (19/10) kemarin.

Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap usulan Pokir DPRD berjalan lebih tertib, terarah, serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya penyaluran kegiatan Pokir dengan undang-undang dan perencanaan pembangunan daerah.

"Usulan yang disampaikan harus memperhatikan kebutuhan rakyat Sidoarjo. Kita berharap hasil dari kegiatan Pokir di Kabupaten Sidoarjo ini benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti dalam program percepatan penurunan angka kemiskinan," ujar Subandi.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekda Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Sidoarjo, M. Ainur Rahman, menegaskan bahwa pelaksanaan Pokir DPRD wajib berpedoman pada rencana pembangunan daerah. [kus.dre]

DPRD Soroti Anak Putus Sekolah, PKBM Didorong Jadi Solusi

KOTA-Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian DPRD. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo didorong memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang terkena dampak ekonomi maupun persoalan keluarga.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih menegaskan, upaya menekan angka ATS dan APS tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal.

Keberadaan pendidikan nonformal juga perlu mendapat perhatian serius agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengelola lembaga pendidikan nonformal.



Abdullah Nasih
Ketua DPRD Sidoarjo

Sumber Daya Manusia (SDM).

Begitu pula dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta yang sama-sama berperan memperluas kesempatan belajar masyarakat.

Karena itu, Pemkab Sidoarjo diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga memberikan dukungan terhadap PKBM sebagai salah satu jalur alternatif bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikannya.

Nasih menjelaskan, PKBM memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang telah putus sekolah.

Melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan.

Program tersebut juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang sudah bekerja, tetapi belum memiliki ijazah sesuai kebutuhan pendidikan maupun pekerjaan.

Dari 1.400 Usulan Program, Hanya 19 yang Sesuai Ketentuan

Masalah Administrasi hingga Tak Selaras Rencana Pembangunan

SIDOARJO – Ribuan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Sidoarjo melalui kegiatan reses menghadapi kendala untuk masuk dalam perencanaan pembangunan 2027. Dari sekitar 1.400 usulan program di pokok pikiran (pokir), hanya 19 yang dinilai sesuai dengan kaidah pengajuan.

Tidak hanya masalah administrasi hingga pengisian data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ada banyak usulan yang tak selaras program pembangunan daerah. Sehingga usulan tidak bisa diakomodasi pemerintah.

Pelaksana Harian (Plh) Se-

kretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, banyaknya usulan yang belum sesuai ketentuan bukan berarti aspirasi masyarakat tidak dibutuhkan. Namun, setiap usulan harus memenuhi mekanisme dan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

"Kesalahan pengisian data dan ketidaklengkapan dokumen dapat membuat aspirasi yang disampaikan tidak terakomodasi dalam perencanaan," kata Ainur di sela-sela acara pembekalan pokir, Senin (19/10).

Ainur menjelaskan, usulan pokir tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam program pembangunan tanpa melalui

Sumber: Plh Sekda Sidoarjo

proses penyesuaian. Setiap usulan harus selaras dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah, termasuk program prioritas bupati dan wakil bupati.

Menurut Ainur, tidak ada jatah anggaran pokir dengan nominal tertentu bagi setiap anggota DPRD. Besaran anggaran yang dapat dialokasikan bergantung pada prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dewan

Diminta Evaluasi

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih meminta se-

tiap usulan benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. "Saya minta agar usulan juga mempertimbangkan program pembangunan pemerintah daerah," kata Nasih.

Dia juga meminta anggota DPRD mengecek kembali usulan yang telah diajukan. Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada daftar permintaan, tetapi memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam mendukung pembangunan daerah. (ful/hen)



Salah pengisian data



Tidak sesuai mekanisme pengajuan



Administrasi kurang lengkap

Tak sesuai program pembangunan daerah



JOKO TRIMONO/AJ JAWA POS

●● Kesalahan pengisian data dan ketidaklengkapan dokumen dapat membuat aspirasi yang disampaikan tidak terakomodasi dalam perencanaan."



**Mohammad
Ainur Rahman**
Plh Sekda Sidoarjo



Abdillah Nasih
Ketua DPRD
Sidoarjo

●● Saya minta usulan juga mempertimbangkan program pembangunan pemerintah daerah."

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BERLUBANG: Dua pohon pisang ditanam di jalan Desa Wonokasian untuk memperingatkan pengendara.

Sepekan Rusak, Warga Tanami Pisang di Jalan Desa Wonokasian

SIDOARJO – Dua pohon pisang berdiri di tengah kerusakan jalan Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu. Bukan tanpa alasan, pohon tersebut ditanam sebagai penanda lubang pada jembatan yang ambles agar pengendara lebih waspada saat melintas.

Dari informasi, kerusakan jalan terjadi sepekan terakhir. Sementara, salah seorang pengendara asal Desa

Semambung, Amrizal mengatakan, kerusakan perlu segera mendapat penanganan. "Itu jembatannya ambles dan bahaya kalau dilewati," katanya.

Camat Wonoayu Anwar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Margas dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo terkait kerusakan tersebut. Dia berharap perbaikan segera

dilakukan agar jalan kembali aman dilalui. "Karena yang rusak ini kan tidak hanya sekadar jalan berlubang, tapi jembatan," terangnya.

Menurut Anwar, kerusakan jembatan membutuhkan penanganan dari dinas terkait. Sebab, perbaikan tidak cukup hanya menyasar permukaan jalan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi bagian jembatan yang ambles. (ful/hen)

Jawa Pos

135 Ribu Kendaraan Menunggak Pajak

SIDOARJO – Tunggakan pajak kendaraan bermotor masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Sidoarjo. Dari sekitar 900 ribu kendaraan yang tercatat, sebanyak 135 ribu kendaraan atau sekitar 15 persen di antaranya masih menunggak pajak. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kabid Pajak Daerah I Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Surendro mengatakan, operasi gabungan menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemilik kendaraan memenuhi kewajiban perpajakannya. "Kami terus melakukan sosialisasi dan penertiban agar masyarakat semakin tertib membayar pajak kendaraan," katanya kemarin (20/10).

Dalam operasi gabungan kemarin, petugas menghentikan sekitar 300 kendaraan yang melintas. Rinciannya, 250 sepeda motor dan 50 mobil. Dari jumlah itu, 40 kendaraan diketahui belum memenuhi kewajiban pajak. Sementara itu, 50 kendaraan lainnya memilih memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk membayar pajak secara langsung.

Surendro menjelaskan, operasi gabungan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran gubernur terkait pelaksanaan operasi, bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan itu, petugas tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan apresiasi kepada pemilik kendaraan yang patuh membayar pajak. (ful/hen)

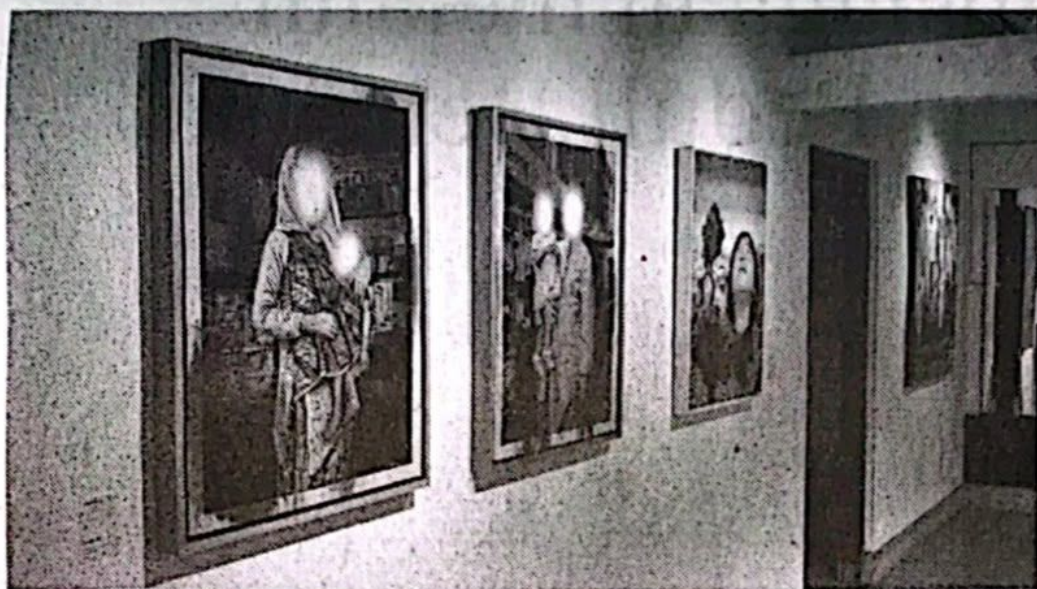


ANGGER BONDAN/JAWA POS

RAZIA: Polisi bersama petugas BPPD Sidoarjo memeriksa STNK pengendara yang melintas di Gelora Delta Sidoarjo kemarin (20/10).

Jawa Pos

BANGKU POJOK



mardi/magang umsida

Tema sejumlah karya lukis yang diusung dalam pameran Sidoarjo in flux.

Sidoarjo In Flux, Diikuti 25 Seniman Asia, Usung Isu Lingkungan dan Budaya

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 25 seniman dari berbagai negara di Asia menampilkan karya terbaik mereka dalam pameran di Kota Sidoarjo dalam ajang Sidoarjo In Flux. Beragam karya seni ditampilkan, mulai dari lukisan, instalasi, video, hingga new media art. Karya mereka mengangkat tema persoalan yang unik, seperti lingkungan, budaya, dan kehidupan sehari-hari.

Ketua Pelaksana Sidoarjo In Flux, Zerfa Robi, mengatakan pameran tersebut menampung karya-karya yang unik dan kreatif. Tidak hanya dua dimensi, tetapi juga video dan pertunjukan. "Pameran yang berlangsung sejak 2 sampai 18 Oktober 2026 ini ada seniman dari Indonesia, Jepang, dan India," kata Zerfa.

Kota Sidoarjo menjadi tahun kedua pelaksanaan Sidoarjo In Flux yang diinisiasi oleh Dekesda Sidoarjo, Rumah Budaya Malik Ibrahim, dan Rumah Seni Pecantingan.

Harapannya, pameran seni ini dapat memberi manfaat pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya di Kota Sidoarjo.

Sejumlah karya seni menarik perhatian pengunjung. Di antaranya, tanaman pohon pule yang menjadi objek riset seniman. Karya ini mengangkat isu hubungan antara manusia, alam, dan teknologi. Seniman Jepang, Osamu Matsuda, menghadirkan karya seni yang terinspirasi dari kawasan industri di Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Aktivitas industri direkam secara slow motion. [kus/mg19.wwn]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KILAS DEWAN

Sosialisasi Tata Kelola Pokir DPRD Harus Ada Manfaat Bagi Warga Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar kegiatan *Sosialisasi Tata Kelola Pokir-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD* Kabupaten Sidoarjo pada Senin (19/10) kemarin.

Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap usulan Pokir DPRD berjalan lebih tertib, terarah, serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya penyelarasan kegiatan Pokir dengan undang-undang dan perencanaan pembangunan daerah.

“Usulan yang disampaikan harus memperhatikan kebutuhan rakyat Sidoarjo. Kita berharap hasil dari kegiatan Pokir di Kabupaten Sidoarjo ini benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti dalam program percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujar Subandi.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekda. Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Sidoarjo, M. Ainur Rahman, menegaskan bahwa pelaksanaan Pokir DPRD wajib berpedoman pada rencana pembangunan daerah. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa



IPNU-IPPNU Jabon Gelar Lakmud Jenggala 2026

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Jabon menggelar Latihan Kader Muda (Lakmud) Jenggala 2026 pada 16-18 Oktober 2026 untuk memperkuat kapasitas, kepemimpinan, dan integritas kader pelajar NU.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Aktualisasi Nilai Aswaja dalam Pembentukan Kader yang Berintegritas, Visioner, dan Adaptif untuk Menjawab Tantangan Zaman."

Lakmud Jenggala 2026 menjadi salah satu upaya pengkaderan untuk membangun mental, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan pelajar NU di tingkat akar rumput.

Melalui pengkaderan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) An-Nahdliyah secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Ketua PAC IPNU Jabon, M. Imam Sufajar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Lakmud bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan wadah pembentukan kader yang siap menghadapi dinamika zaman. "Lakmud Jenggala 2026 ini hadir sebagai wadah untuk mencetak kader-kader muda yang tidak hanya berakar kuat pada nilai-nilai Aswaja, tetapi juga memiliki integritas tinggi, pandangan yang visioner, serta kelincahan dalam beradaptasi.

Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pengkaderan ini dengan sungguh-sungguh demi kemajuan IPNU IPPNU di Kecamatan Jabon," kata Fajar dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Sementara itu, perwakilan PC IPNU-IPPNU Sidoarjo, M. Sirojul, menekankan pentingnya peran pelajar NU dalam menghadapi perkembangan era digital dan modernisasi. (hba)



Wabup Mimik Dorong Siswa Gemar Baca di Perpustakaan Digital

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mendorong penguatan budaya literasi di kalangan pelajar melalui pengembangan perpustakaan digital sekolah. Menurutnya, kemudahan akses bacaan perlu diimbangi dengan kebiasaan memahami dan menceritakan kembali isi buku yang dibaca.

Hal itu disampaikan Mimik saat menerima audiensi Pustaka Media Guru di rumah dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pengembangan program Perpustakaan Digital Sekolah untuk memperluas akses bacaan sekaligus mendorong kreativitas siswa.

Mimik mengatakan, kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak dini. Tidak hanya membaca, siswa juga perlu diberi kesempatan untuk menceritakan kembali isi buku agar pemahaman dan kemampuan berkomunikasi mereka semakin berkembang. "Jangan sekadar membaca. Kalau bisa, setelah membaca harus diceritakan agar ada kemauan untuk membaca kembali," ujar Mimik dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Menurutnya, ruang bagi siswa untuk menyampaikan kembali isi bacaan dapat membuat mereka merasa dihargai dan didengarkan. Hal itu diharapkan



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana dorong budaya gemar membaca lewat perpustakaan digital.

menumbuhkan semangat untuk terus membaca dan memperluas wawasan.

"Kalau anak-anak ini diberikan wadah untuk menceritakan kembali kan akhirnya dia merasa didengarkan. Jadi, besoknya lagi dia akan mau membaca dan bercerita kembali agar kreativitasnya terus berjalan dengan banyak wawasan dan kosa-kata lewat membaca," imbuhnya.

Pemimpin Redaksi Pustaka Media Guru, Eko Prasetyo, menjelaskan bah-

wa program Perpustakaan Digital Sekolah dikembangkan untuk memudahkan siswa mengakses bahan bacaan di tengah perkembangan teknologi.

Menurut Eko, layanan tersebut dapat diakses secara gratis melalui aplikasi pada perangkat Android dan iOS. Sekolah juga dapat memantau aktivitas membaca siswa, mulai dari durasi membaca hingga jumlah buku yang telah diselesaikan. "Perpustakaan digital ini dapat diakses melalui aplikasi pada

perangkat Android dan iOS secara gratis. Sistemnya juga memungkinkan sekolah memantau aktivitas membaca setiap siswa," jelas Eko.

Selain memperluas akses bacaan, platform tersebut memungkinkan sekolah menambah koleksi buku digital dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan pengadaan buku cetak. Siswa juga dapat memanfaatkan platform untuk mengembangkan cerpen dan karya tulis lainnya sebagai konten lokal.

Eko berharap pengembangan program itu dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, termasuk dengan melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Netti Lastiningsih, menyambut baik upaya pengembangan budaya literasi melalui perpustakaan digital. Ia menyebut lebih dari 100 sekolah telah mengembangkan perpustakaan dengan sistem yang beragam.

Netti menegaskan, penerapan perpustakaan digital perlu disesuaikan dengan kondisi dan sistem yang telah berjalan di masing-masing sekolah. Pemilihan bahan bacaan juga harus mempertimbangkan jenjang pendidikan serta kemampuan membaca siswa. (md/rus)

Bupati Subandi Pastikan Rumah Nyaris Roboh Segera Diperbaiki

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Senin (19/10/2026). Dalam kunjungan itu, Subandi memastikan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga segera dilakukan. Dia juga menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga penyandang disabilitas dan penderita stroke.

Sidak tersebut dilakukan bersama Dinas Sosial Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, perangkat desa, serta RT/RW setempat. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah Sukarsih (66), warga RT 02 RW 05 Desa Watutulis, yang kondisinya memprihatinkan dan nyaris roboh.

Melihat kondisi rumah tersebut, Subandi memastikan perbaikan akan dimulai dalam waktu dekat. Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 juta untuk mendukung perbaikan rumah tersebut. "Inshaallah minggu depan sudah mulai ada perbaikan. Sebelum ada perbaikan, saya minta Pak Kades mengajak warga untuk swadaya, kerja bakti bersama-sama membersihkan dan menyiapkan lingkungan sekitar," kata Subandi, Selasa, (20/10/2026).

Menurut Subandi, anggaran perbaikan perlu didukung dengan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong. Dengan begitu, proses pembangunan rumah dapat berjalan lebih optimal dan hasilnya bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. "Kalau hanya mengandalkan anggaran Rp 25 juta tanpa swadaya masyarakat, tentu tidak cukup. Karena itu lingkungan sekitar kami harapkan ikut membantu," ujarnya. (md/rus)



Bupati Subandi memberikan bantuan ke warga Prambon Sidoarjo.

Belum Penuhi Syarat, SPPG Diusulkan Berhenti

■ Pemkab Perketat Izin

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat pengawasan dan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo Subandi menerbitkan surat edaran (SE) untuk menegaskan kewajiban pemenuhan persyaratan perizinan, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SPPG yang belum menuntaskan persyaratan perizinan akan diusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak beroperasi sementara waktu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para penerima manfaat.

Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait monitoring dan evaluasi program MBG di Ruang Transit Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, Selasa (20/10).

Subandi mengatakan, pengawasan terhadap pemenuhan perizinan seluruh SPPG akan ditingkatkan. Pengelola yang masih memiliki kekurangan persyaratan akan mendapat



**Pengawasan lebih
kita perketat,
terutama terkait
perizinan yang
harus dipenuhi. Bagi
yang masih ada
kekurangan, tetap
kita atensi dan nanti
dibantu oleh Dinkes.”**

Subandi
Bupati Sidoarjo

perhatian dan pendampingan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo.

“Pengawasan lebih kita perketat, terutama terkait perizinan yang harus dipenuhi. Bagi yang masih ada kekurangan, tetap kita atensi dan nanti dibantu oleh Dinkes,” ujar Subandi.

Menurut dia, penerbitan SE merupakan langkah antisipatif agar persoalan administrasi dan perizinan tidak muncul setelah SPPG beroperasi. Seluruh persyaratan diharapkan dipenuhi sejak awal sehingga pelaksanaan program tidak terganggu di kemudian hari.

Subandi menegaskan, MBG merupakan program strategis nasional yang harus didukung bersama. Namun, dukungan

● Ke Halaman 10

Belum Penuhi Syarat...

tersebut harus diimbangi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, terutama terkait kelayakan sanitasi dan keamanan pangan.

"Kita mendukung program Presiden. Kekurangan perizinan harus menjadi perhatian. Karena itu, kita perlu berkolaborasi dan berkomunikasi agar pelaksanaan MBG di Sidoarjo bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Pemkab Sidoarjo juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi

secara berkala. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kesiapan dan kapasitas SPPG, kualitas serta keamanan makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga standar pelayanan dan distribusi.

Setiap SPPG diminta meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan. Makanan yang disediakan harus memenuhi kebutuhan gizi, layak dikonsumsi, diolah secara higienis, dan didistribusikan tepat waktu.

Selain itu, pengelola SPPG diharapkan memiliki mekanisme pengaduan

yang disertai tindak lanjut cepat terhadap keluhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, sekolah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan BGN juga perlu diperkuat untuk mempercepat identifikasi serta penanganan persoalan di lapangan.

Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penerbitan SLHS yang menjadi bagian dari tugas instansinya. Dinkes juga akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap SPPG

sesuai tugas dan kewenangannya.

"Karena kami yang menerbitkan SLHS, tentunya kami akan mengevaluasi SLHS yang sudah dikeluarkan. Sesuai tugas dan fungsi Dinkes, kami juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap SPPG," jelasnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi menyatakan TNI bersama Forkopimda mendukung penuh pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan pengawasan pada setiap tahapan penyediaan makanan.

Mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan di dapur, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Abraham juga meminta setiap koordinator SPPG segera melaporkan dan berkoordinasi dengan unsur terkait apabila menemukan permasalahan di lapangan.

Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas pelaksanaan program terus meningkat dan persoalan serupa tidak terulang. (dik/vga)



GERAK CEPAT: Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kanan) saat melihat kondisi KB/TK Islam Chairina, Tempuran, Tarik, Sidoarjo.

Bupati Subandi Siapkan Anggaran Perbaikan KB/TK Islam Chairina Pascakebakaran

TARIK-Bupati Sidoarjo Subandi bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang merusak bangunan KB/TK Islam Chairina di Dusun Tempuran, Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Perbaikan sekolah tersebut menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal dan siswa tidak terlalu lama terdampak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan dua alternatif pembiayaan untuk mempercepat perbaikan, yakni melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bupati dan program revitalisasi

sekolah yang diajukan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Subandi menegaskan, perbaikan fasilitas pendidikan tersebut tidak boleh berlarut-larut. Dia tidak ingin proses administrasi membuat anak-anak kehilangan kenyamanan dalam belajar. Karena itu, perkembangan pengajuan bantuan akan dipantau untuk memastikan penanganan segera dilakukan.

"Ini tadi dari Dapodik menyampaikan ada alternatif dari data revitalisasi. Namun, jangan sampai lama karena ini tempat pendidikan. Kalau terlalu lama, kasihan

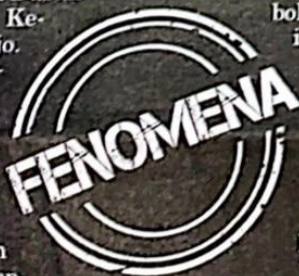
anak-anak," ujar Subandi saat meninjau lokasi, Selasa (20/10).

Menurut dia, BKK Bupati dapat menjadi alternatif apabila proses pengajuan melalui program revitalisasi sekolah membutuhkan waktu terlalu lama. Pemkab Sidoarjo akan memantau perkembangan pengajuan melalui Dapodik dalam dua pekan ke depan.

Jika belum ada kepastian, pemerintah daerah siap mengambil langkah melalui BKK agar perbaikan sekolah tidak terus tertunda.

"Nanti kita cek. Kalau dalam waktu dua minggu usulan ini ke Dapodik belum masuk, lebih baik kita tangani sendiri supaya anak-anak kita bisa segera sekolah," tegasnya.

● Ke Halaman 10



Bupati Subandi...

Seperti diberitakan sebelumnya, kebakaran melanda dapur rumah milik Muhammad Anshor di Dusun Tempuran, Desa Tarik, Minggu (18/10) sekitar pukul 09.00. Api sempat merambat ke bangunan KB/TK Islam Chairina sebelum petugas pemadam

kebakaran tiba di lokasi.

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Krian yang menerima laporan langsung dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain di sekitarnya.

Selain meninjau sekolah, Subandi juga mendapati rumah warga di belan-

kang KB/TK Islam Chairina dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian atap rumah tersebut telah keropos sehingga membutuhkan perbaikan agar layak dan aman untuk dihuni.

Subandi meminta pemerintah desa segera mendata pemilik rumah sebagai dasar pengajuan bantuan perbaikan. Dia menargetkan penanganan

awal dapat dilakukan pekan depan.

"Atapnya tadi saya lihat sudah keropos. Nanti kita siapkan, minimal minggu depan sudah bisa dilakukan perbaikan," katanya.

Subandi juga meminta kepala desa menyiapkan data kependudukan pemilik rumah untuk mendukung proses pengajuan bantuan. Pemkab Sidoarjo

akan mengawal proses tersebut agar warga dapat menempati rumah yang lebih layak dan aman.

"Nanti Pak Kades, saya minta data KTP-nya dan kita kawal agar bisa diperbaiki menjadi rumah layak huni. Kalau hujan tidak kejujuran dan saat kondisi panas seperti ini tidak ada kekhawatiran," pungkasnya. (dik/vga)

DPRD Soroti Anak Putus Sekolah, PKBM Didorong Jadi Solusi

KOTA-Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian DPRD. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo didorong memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang terken-
dala ekonomi maupun persoalan keluarga.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menegaskan, upaya menekan angka ATS dan APS tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal.

Keberadaan pendidikan nonformal juga perlu mendapat perhatian serius agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengelola lembaga pendidikan nonformal.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rapat kerja (raker) bersama komisi-komisi DPRD Sidoarjo, masih terdapat kesenjangan antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Delta.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Sebagian anak menghadapi kendala untuk melanjutkan sekolah, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga tanggungjawab merawat anggota keluarga yang sakit.

"Harapan kita ke depan, Pemkab juga aware kepada teman-teman di PKBM. Harus dirangkul, tidak ada dikotomi antara pendidikan formal dan nonformal," ujar Abdillah, Selasa (20/10).

Menurut dia, pendidikan formal maupun nonformal memiliki tanggungjawab yang sama dalam meningkatkan kualitas



DIKY SANUSIRADAR SIDOARJO
Abdillah Nasih
Ketua DPRD Sidoarjo

Sumber Daya Manusia (SDM).

Begitu pula dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta yang sama-sama berperan memperluas kesempatan belajar masyarakat.

Karena itu, Pemkab Sidoarjo diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga memberikan dukungan terhadap PKBM sebagai salah satu jalur alternatif bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikannya.

Nasih menjelaskan, PKBM memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang telanjur putus sekolah.

Melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan.

Program tersebut juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang sudah bekerja, tetapi belum memiliki ijazah sesuai kebutuhan pendidikan maupun pekerjaan.

Dengan demikian, keterbatasan akses terhadap sekolah formal tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk menyelesaikan pendidikan.

"Anak-anak yang sudah telanjur putus sekolah harus tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. PKBM bisa menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan kesetaraan, sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk meraih ijazah," tegasnya.

DPRD Sidoarjo pun mendorong Pemkab memperkuat sinergi dengan para pengelola PKBM, termasuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Langkah tersebut dinilai penting agar layanan pendidikan nonformal semakin mudah dijangkau oleh anak-anak maupun masyarakat yang belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. (dik/vga)